

**SKRIPSI**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER**  
**DARI NON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI**  
**KABUPATEN PASAMAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**TEJA PERMANA PUTRA**

**1510111170**

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK VI)**



Pembimbing :

**Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH**

**Dr. Khairul Fahmi, SH., MH**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2020**

# **PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI NON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN**

(Teja Permana Putra, 1510111170, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V  
(Hukum Tata Negara) 56 Halaman, 2020)

## **ABSTRAK**

Dalam prinsip pokok pengelolaan keuangan partai politik tertera prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang mana prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik dan prinsip akuntabilitas merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dalam suatu kegiatan partai politik. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah: *pertama* bagaimana pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber dari non APBD di Kabupaten Pasaman? *kedua* bagaimana pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari non anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pasaman? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pengurus partai politik di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: a. Dalam konteks daerah Pasaman pengelolaan keuangan partai yang bersumber dari luar anggaran pendapatan dan belanja daerah belum dilakukan secara efektif sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan partai politik dilakukan b. Minimnya laporan tentang pemasukan dan pengeluaran dari partai politik tempat penulis melakukan penelitian. Untuk itu perlu diperhatikan tentang laporan pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber dari non anggaran pendapatan dan belanja daerah.